



Peranan Ekonomi Moneter Syariah dalam Upaya Mengatasi Kemiskinan di Indonesia

Bunga Ahista Rania^{1*}, Marcelino Rizki Suryanto², Athfiatul Ashfiyah³, Rasidah Novitasari⁴

¹⁻⁴ Program studi Ekonomi Syariah, Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hassanudin Banten, Indonesia

221410142.bunga@uinbanten.ac.id^{1*}, 221410149.marcelino@uinbanten.ac.id²,
221410156.athfiatul@uinbanten.ac.id³, rasidah.novita@uinbanten.ac.id⁴

Alamat: R5F3+43Q, Jl. Syekh Moh. Nawawi Albantani, Kemanisan, Kec. Curug, Kota Serang, Banten

Korespondensi penulis: 221410142.bunga@uinbanten.ac.id

Abstract: *The focus of sharia monetary economics is to apply Islamic rules in financial management to improve welfare and reduce poverty. The system emphasizes the concepts of justice and equity and avoids elements such as usury, uncertainty, and excessive speculation. The sharia monetary economy aims to increase income equality by using instruments such as zakat, infaq, alms, and waqf. This study shows how sharia monetary economics can help overcome poverty in Indonesia, especially through sharia financial instruments such as microfinance institutions and yield principles. Studies show that Islamic finance improves economic stability and helps people achieve sustainable prosperity.*

Keywords : *Sharia Monetary Economy, Poverty Alleviation, Sharia Financial Instruments*

Abstrak: Fokus ekonomi moneter syariah adalah menerapkan aturan Islam dalam manajemen keuangan untuk meningkatkan kesejahteraan dan mengurangi kemiskinan. Sistem ini menekankan konsep keadilan dan pemerataan dan menghindari elemen seperti riba (bunga), ketidakpastian, dan spekulasi yang berlebihan. Ekonomi moneter syariah bertujuan untuk meningkatkan kesetaraan pendapatan dengan menggunakan instrumen seperti zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Studi ini menunjukkan bagaimana ekonomi moneter syariah dapat membantu mengatasi kemiskinan di Indonesia, terutama melalui instrumen keuangan syariah seperti lembaga keuangan mikro dan prinsip hasil. Studi menunjukkan bahwa keuangan syariah meningkatkan stabilitas ekonomi dan membantu masyarakat mencapai kesejahteraan yang berkelanjutan.

Kata kunci : Ekonomi Moneter Syariah, Pengentasan Kemiskinan, Instrumen Keuangan Syariah

1. PENDAHULUAN

Ekonomi moneter syariah adalah bidang ilmu yang mengelola kebijakan moneter berdasarkan prinsip Islam, dengan menekankan kesejahteraan, keseimbangan, dan keadilan. Gharar (yang berarti ketidakpastian) dan maysir (yang berarti spekulasi) dilarang oleh sistem ini (Zunaidi et al. 2023). Tujuannya adalah untuk mewujudkan keadilan (iqamah al-adl) dan keuntungan umum (jalb al-maslahah) bagi masyarakat. Zakat, wakaf, dan instrumen keuangan syariah dimaksudkan untuk meningkatkan pemerataan pendapatan, stabilitas ekonomi, dan penanganan kemiskinan.

Kemiskinan adalah masalah krusial yang dihadapi baik oleh negara maju maupun berkembang, meskipun tingkat kemiskinan di negara berkembang, termasuk Indonesia, cenderung lebih tinggi. Di negara berkembang, kemiskinan sering disebabkan oleh distribusi

kekayaan yang tidak merata, keterbatasan akses terhadap pendidikan dan layanan kesehatan, serta minimnya peluang ekonomi. Meskipun berbagai program telah diupayakan oleh pemerintah dan sektor swasta, kemiskinan tetap menjadi isu utama yang membutuhkan solusi lebih mendalam.

Analisis Kurva Penurunan Kemiskinan (2020–2024) Penurunan nomor kemiskinan pada Indonesia memperlihatkan kemajuan yg konsisten meskipun laju penurunannya nisbi lambat. Data memperlihatkan bahwa taraf kemiskinan turun berdasarkan 10,19% dalam tahun 2020 sebagai 9,03% dalam Maret 2024, mencerminkan efektivitas sejumlah kebijakan pemerintah & forum terkait.

Intervensi misalnya acara donasi sosial, pembinaan keterampilan melalui Kartu Prakerja, dan dukungan buat UMKM sudah membantu menaikkan daya tahan gerombolan warga rentan. Namun, pandemi COVID-19 menaruh tantangan signifikan dalam awal periode ini, meskipun kebijakan misalnya Bantuan Sosial Tunai (BST) berhasil menaruh pengaruh positif pada meringankan beban warga miskin.

Sektor keuangan syariah juga berkontribusi akbar melalui instrumen redistribusi kekayaan misalnya zakat, infak, sedekah, & wakaf. Instrumen-instrumen ini sudah dipakai buat menyediakan kapital bisnis kecil, mendukung proyek-proyek sosial, & mengatasi kebutuhan dasar warga kurang mampu. Meskipun demikian, tantangan primer masih mencakup ketimpangan pendapatan, keterbatasan distribusi manfaat kebijakan, & rendahnya literasi keuangan syariah pada sebagian akbar warga.

Untuk menaikkan efektivitas, dibutuhkan pendekatan yg lebih inklusif & berkelanjutan guna memastikan bahwa manfaat berdasarkan kebijakan ini bisa dirasakan sang semua lapisan warga. Dalam surat Al-Dzariyat (51) ayat 19 Allah SWT berfirman yang berbunyi:

“Dalam harta mereka ada hak untuk (orang miskin yang meminta) dan yang tidak berkecukupan (walaupun tidak meminta).”

Dengan penerapan yang tepat, sistem ini diharapkan bisa berpotensi untuk mengurangi kesenjangan ekonomi sekaligus menciptakan stabilitas sosial yang lebih baik. Pendekatan dalam jurnal ini bertujuan untuk mengkaji teori dasar ekonomi moneter syariah dan peranannya dalam mengatasi kemiskinan, baik secara konsep maupun implementasi. Penelitian ini juga akan membahas tantangan dan peluang yang dihadapi dalam menerapkan kebijakan ekonomi moneter syariah untuk menciptakan masyarakat yang lebih sejahtera dan berkeadilan.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini mengadopsi pendekatan kualitatif. Untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang peran ekonomi moneter syariah dalam mengurangi kemiskinan di Indonesia, penelitian ini menggunakan metodologi kualitatif. Data dikumpulkan dari berbagai sumber, termasuk buku, jurnal ilmiah, artikel, dan sumber internet yang dapat diandalkan, sebagai bagian dari metode penelitian ini. Metode ini memungkinkan peneliti untuk menemukan dan memahami konsep, teori, dan hasil penelitian sebelumnya yang relevan dengan topik penelitian. Selanjutnya, data dikumpulkan dianalisis secara deskriptif untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang masalah yang diteliti.

Tujuan utama penelitian ini adalah untuk menjelaskan konsep dan praktik ekonomi moneter syariah dalam pengurangan kemiskinan. Dengan menekankan prinsip-prinsip Islam seperti keadilan, keseimbangan, dan pembagian, bagian ini juga menyajikan kajian literatur yang mendasari penelitian ini, dengan fokus pada konsep dan teori yang relevan. Semua penelitian, terutama yang bersifat akademik, perlu didukung oleh kajian pustaka yang baik. Dengan itu, penulis bisa menemukan solusi atas masalah yang diteliti.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kemiskinan di Indonesia

Persentase penduduk miskin Indonesia sebesar 9,03 persen pada Maret 2024, meningkat 0,33% dibandingkan dengan persentase pada Maret 2023. Akibatnya, jumlah penduduk miskin pada Maret 2024 sebesar 25,22 juta orang, turun 0,68 juta orang dari Maret 2023. Dalam arti luas, kemiskinan adalah ketika seseorang atau sekelompok orang tidak dapat memenuhi hak-hak dasar mereka untuk menjalani dan menjalani kehidupan yang bermartabat. Namun, dalam berita resminya, Badan Pusat Statistik (BPS) mengonsepskan bahwa kemiskinan didefinisikan sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan, dan bahwa orang yang memiliki pengeluaran rata-rata per kapita atau pendapatan bulanan di bawah garis kemiskinan dianggap miskin. Per Maret 2024, garis kemiskinan sebesar Rp 582.932 per kapita per bulan, dengan garis kemiskinan makanan sebesar Rp 433.906 (74,44 persen) dan garis kemiskinan bukan makanan sebesar Rp 149.026 (25,56 persen)

.Kamus Besar Bahasa Indonesia mendefinisikan kemiskinan sebagai "keadaan miskin, dimana seseorang tidak berharta, serba kekurangan, atau berpenghasilan rendah." Dalam definisi lain, suparlan mengatakan bahwa kemiskinan adalah standar tingkat hidup yang rendah karena kekurangan materi pada sejumlah atau golongan orang bila dibandingkan dengan standar

kehidupan yang berlaku di masyarakat sekitarnya (Wisnuna, Firmansyah, dan Madura 2024). Dalam pandangan Islam, kemiskinan mencakup aspek spiritual, moral, dan sosial selain kekurangan materi.

Dalam Islam, kemiskinan didefinisikan sebagai keadaan di mana seseorang atau kelompok tidak memiliki akses yang memadai terhadap sumber daya yang diperlukan untuk mencapai kemakmuran dunia dan akhirat. Terwujudnya pembagungan ekonomi yang adil dan setara, bersama dengan prinsip keadilan sosial, adalah tujuan pembangunan ekonomi negara. Untuk kesejahteraan umum, pemerintah Indonesia harus terus berusaha mengatasi kemiskinan. Ini dapat dilakukan dengan data yang disebutkan di atas.

Untuk mencapai penurunan kemiskinan, kerangka kebijakan dan intervensi yang tepat diperlukan (Kemiskinan 2021). Kerangka kebijakan penganggulungan saat ini membagi intervensi menjadi dua kelompok: program untuk menurunkan beban pengeluaran dan program untuk meningkatkan kapasitas pendapatan. Kedua kelompok ini bekerja sama untuk mempercepat penurunan kemiskinan. Kebijakan dan program yang sudah diterapkan untuk mengurangi pengeluaran masyarakat termasuk program bantuan sosial, seperti Program Sembako dan Program Indonesia Pintar, dan program jaminan sosial, seperti bantuan iuran yang diberikan oleh Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial Kesehatan-Penerima Bantuan Iuran. Dalam situasi darurat COVID-19, pemerintah juga mengeluarkan program Bantuan Sosial Tunai (BST). Pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), pembangunan ekonomi lokal, Program Kartu Prakerja, dan Kredit Usaha Rakyat adalah beberapa kebijakan dan program pemerintah yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas pendapatan.

Peran Ekonomi Moneter Syariah dalam Upaya Mengatasi Kemiskinan

Berpondasi pada nilai-nilai Islam, pengelolaan moneter bertujuan untuk menciptakan stabilitas harga dan stabilitas ekonomi dengan membantu mencapai tujuan pembangunan ekonomi negara. Keadilan dalam pembagian kekayaan dan tidak berlakunya bunga adalah pilar sistem keuangan Islam. Ketidakstabilan ekonomi bisa berdampak pada pembangunan ekonomi negara termasuk dalam mengatasi kemiskinan pada suatu negara, ketidakstabilan tersebut bisa disebabkan oleh bunga (riba). Maka, kebijakan moneter Islam harus bebas dari unsur riba dan bunga bank. Sistem keuangan menurut Islam menggunakan sistem pembagian keuntungan dan kerugian atau biasa disebut bagi hasil. Tidak hanya pada instrumen bagi hasil di bank syariah, namun pada kebijakan ini diupayakan instrumen-instrumen lain menerapkan bebas pada riba.

Perluasan pembiayaan bank syariah akan berdampak pada keseimbangan ekonomi, yang pada gilirannya akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi. Indonesia memiliki sistem keuangan syariah yang semakin berkembang (Wisnuna, Firmansyah, dan Madura 2024). Ini terbukti oleh peningkatan instrumen moneter syariah seiring dengan peningkatan kinerja dan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap perbankan syariah.

Peran akan ekonomi moneter syariah dalam mengatasi kemiskinan di Indonesia terdapat beberapa cara (Sari 2024), yaitu :

a. Prinsip bagi hasil

Seperti yang sudah disebutkan diatas, bunga bisa menyebabkan masalah ketidakstabilan ekonomi di Indonesia. Prinsip bagi hasil atau pada bank syariah juga disebut dengan akad mudharabah ialah memberikan dana kepada nasaah sebagai pengelola dana. Keuntungan dan kerugian yang dihasilkan dari usaha tersebut kemudian dibagi berdasarkan nisbah yang telah disepakati. Prinsip ini menggantikan sistem bunga (riba) pada perbankan konvensional. Karena terbebas dari bunga, prinsip ini dapat memberdayakan perekonomian masyarakat kecil dan meningkatkan pendapatan.

b. Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) :

Lembaga-lembaga ini, termasuk Baitul Mal wa Tamwil (BMT), didirikan untuk membantu masyarakat berpenghasilan rendah, terutama usaha kecil dan menengah (UMKM). Pertumbuhan pesat lembaga mikro syariah menunjukkan tingginya kebutuhan akan akses keuangan di Indonesia. Sebagai bagian dari LKMS, BMT sangat terlibat karena sebagian besar penduduk Indonesia berasal dari kelas menengah ke bawah. Oleh karena itu, melalui pengembangan ekonomi negara Indonesia, Organisasi Bantuan Masyarakat (BMT) memainkan peran penting dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat.

c. Penyaluran ZISWAF

Merupakan singkatan dari zakat, infak, sedekah dan wakaf. Zizwaf merupakan salah satu instrumen dalam upaya mengatasi kemiskinan. Salah satu kewajiban umat muslim adalah memberikan sebagian harta mereka untuk diberikan kepada orang-orang yang kurang beruntung. Ini dikenal sebagai zakat. Zakat berfungsi sebagai alat untuk mengurangi disparitas ekonomi dan sosial serta untuk mendistribusikan kekayaan. Infak, tidak seperti zakat, adalah sumbangan yang dilakukan secara sukarela. Namun, donasi ini dapat berkontribusi pada berbagai program sosial yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin, pendidikan, dan

layanan kesehatan. Seperti infak, sedekah adalah instrumen yang hampir sama, dan sedekah adalah salah satu cara untuk mendekati diri kepada Allah SWT. Wakaf, di sisi lain, adalah tindakan menyumbangkan harta benda secara konsisten untuk kepentingan umum. Harta yang diwakafkan dapat berupa tanah, bangunan, atau uang, dan akan dikelola untuk menghasilkan manfaat bagi masyarakat, seperti pembangunan sekolah, rumah sakit, atau fasilitas umum lainnya.

Kurva Penurunan Kemiskinan di Indonesia (2020-2024)

Sebuah laporan yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan tren penurunan tingkat kemiskinan di Indonesia :

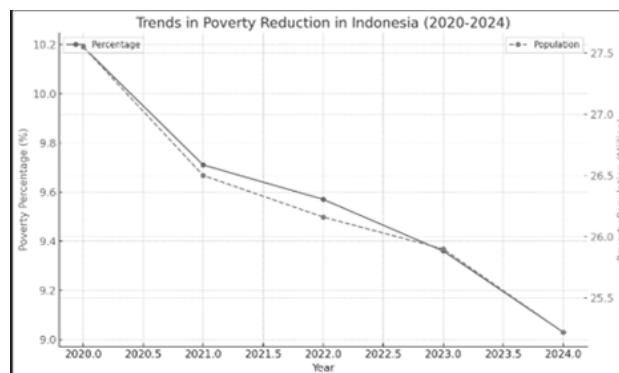
Tabel 1

Tahun	Persentase Penduduk Miskin (%)	Persentase Penduduk Miskin (%)
2020	10,19	27,55
2021	9,71	26,50
2022	9,57	26,16
2023	9,36	25,90
2024	9,03	25,22

Metode Analisis Kurva

- Meskipun penurunan angka kemiskinan terjadi secara perlahan, itu menunjukkan tren positif.
- Sektor keuangan syariah membantu orang miskin mendapatkan akses ke uang melalui instrumen zakat, wakaf, dan program inklusi keuangan.
- Namun, ketimpangan pendapatan dan distribusi manfaat kebijakan pemerintah yang tidak merata masih menjadi masalah.

Berikut adalah kurva yang menggambarkan tren penurunan kemiskinan di Indonesia selama periode 2020–2024:



Gambar 1

- a. **Garis Biru** : Menunjukkan penurunan persentase penduduk miskin.
- b. **Garis Hijau Putus-Putus** : Menunjukkan penurunan jumlah penduduk miskin (dalam jutaan orang).

4. SIMPULAN DAN SARAN

Dalam upaya mengurangi kemiskinan di Indonesia, ekonomi moneter syariah memiliki peran strategis. Zakat, infak, sedekah, dan wakaf telah terbukti membantu redistribusi pendapatan dan memberdayakan masyarakat lapisan bawah dengan pendekatan yang berbasis keadilan, keseimbangan, dan inklusi. Selain itu, lembaga keuangan syariah seperti bank syariah dan Baitul Mal wa Tamwil (BMT) sangat berperan dalam menyediakan layanan keuangan kepada orang-orang yang tidak dapat menggunakannya karena sistem keuangan konvensional.

Data menunjukkan tren positif dalam penurunan kemiskinan di Indonesia; pada Maret 2024, persentase orang miskin turun dari 10,19 persen pada tahun 2020 menjadi 9,03 persen. Tapi masih ada masalah. Misalnya, kurangnya pengetahuan tentang keuangan syariah, ketimpangan pendapatan, dan pembagian keuntungan kebijakan yang tidak merata. Ekonomi moneter syariah diharapkan berkembang dengan terus memperkuat kerja sama antara pemerintah, lembaga keuangan syariah, dan masyarakat.

Ucapan Terima Kasih

Ucapan terima kasih yang tulus Penulis mengucapkan terima kasih kepada semua orang yang telah membantu menyusun materi ini, terutama kepada lembaga yang menyediakan data, seperti Badan Pusat Statistik (BPS), Bank Indonesia, dan banyak jurnal dan publikasi yang relevan. Selain itu, Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hassanudin Banten dan semua orang yang telah membantu secara akademik dan moral selama proses penyelesaian tulisan ini diucapkan terima kasih.

DAFTAR PUSTAKA

- Anisa Mawaddah Nasution, dan Maryam Batubara. 2023. "Penerapan Kebijakan Moneter Islam pada Sistem Perekonomian Indonesia." *Jurnal Penelitian Ekonomi Akuntansi (JENSI)* 7 (1): 144–54. <https://doi.org/10.33059/jensi.v7i1.7665>.
- Kemiskinan, Tim Nasional Percepatan Penanggulangan. 2021. "Ringkasan Kebijakan: Strategi Penghapusan Kemiskinan Ekstrem di Indonesia," 1–8. <https://tnp2k.go.id/download/51020673>. Strategi Penghapusan Kemiskinan Ekstrem di Indonesia.pdf.

- Sari, Yovita. 2024. "Kebijakan Moneter Islam Dalam Upaya Mengendalikan Inflasi." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 10 (1): 621. <https://doi.org/10.29040/jiei.v10i1.11938>.
- Wisnuna, Erizky Elsa, Angga Maulana Firmansyah, dan Universitas Trunojoyo Madura. 2024. "Perspektif ekonomi moneter syariah: tinjauan terhadap implikasi dan praktik keuangan berbasis syariah" 2 (6).
- Zunaidi, A., V. A., Humaira, N., Nabil, G., Saputra, I., Ismail, dan M. Murliati. 2023. "Manajemen Zakat dan Waqaf" 3 (2): 40–44. [https://repository.iainkediri.ac.id/1034/1/Manajemen Ziswaf 2023.pdf](https://repository.iainkediri.ac.id/1034/1/Manajemen%20Ziswaf%202023.pdf).
- Liputan6. (2024). 7 Penyebab Kemiskinan dan Pengertiannya Menurut Ahli, Wajib Dipahami. Diakses dari <https://www.liputan6.com/hot/read/4566760/7-penyebab-kemiskinan-dan-pengertiannya-menurut-ahli-wajib-dipahami?page=3>.